

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rakhmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412

Telepon (0358)321746 Faks (0358) 321111

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) KABUPATEN NGANJUK**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

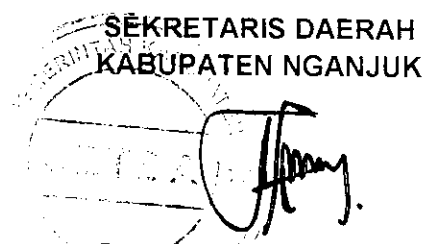
Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT. atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Nganjuk, 2021

No	Revisi	Tanggal
1	H	18/2 2021
2		
3	Keseluruhan	18/2 2021



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadirat Allah SWT. atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Nganjuk, 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Organisasi	3
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis Organisasi	10
2.2. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Orgainsasi	20
3.2. Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Saran	43

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LkjIP. Informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan sasaran :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah.
2. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3. Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas
4. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan.
5. Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100%	100%	100%

Sasaran 2. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sasaran 3. Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase produk hukum yang	100%	100%	100%

tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya			
--	--	--	--

Sasaran 4. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%

Sasaran 5. Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	100% (175 paket)	168% (252 paket)	200%

Sasaran 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	45 %	68%	151,11%

Sasaran 7. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	100 %	100%	100%

Keseluruhan anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sebesar Rp.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkjiP Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Sekretariat Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023. Rencana Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

1.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.2.Dasar Hukum

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2. Gambaran Organisasi

1.2.1. Gambaran umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan Urusan Wajib dan otonomi daerah pelaksanaan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas internal pemerintah daerah yang meliputi administrasi pemerintahan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas aparatur, dan peningkatan kualitas kebijakan publik serta melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya

1.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, terdiri dari :

- a. **Sekretaris Daerah**
- b. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 - 1.1. Sub Bagian Pemerintahan;
 - 1.2. Sub Bagian Wilayah dan Kerja Sama;
 - 1.3. Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

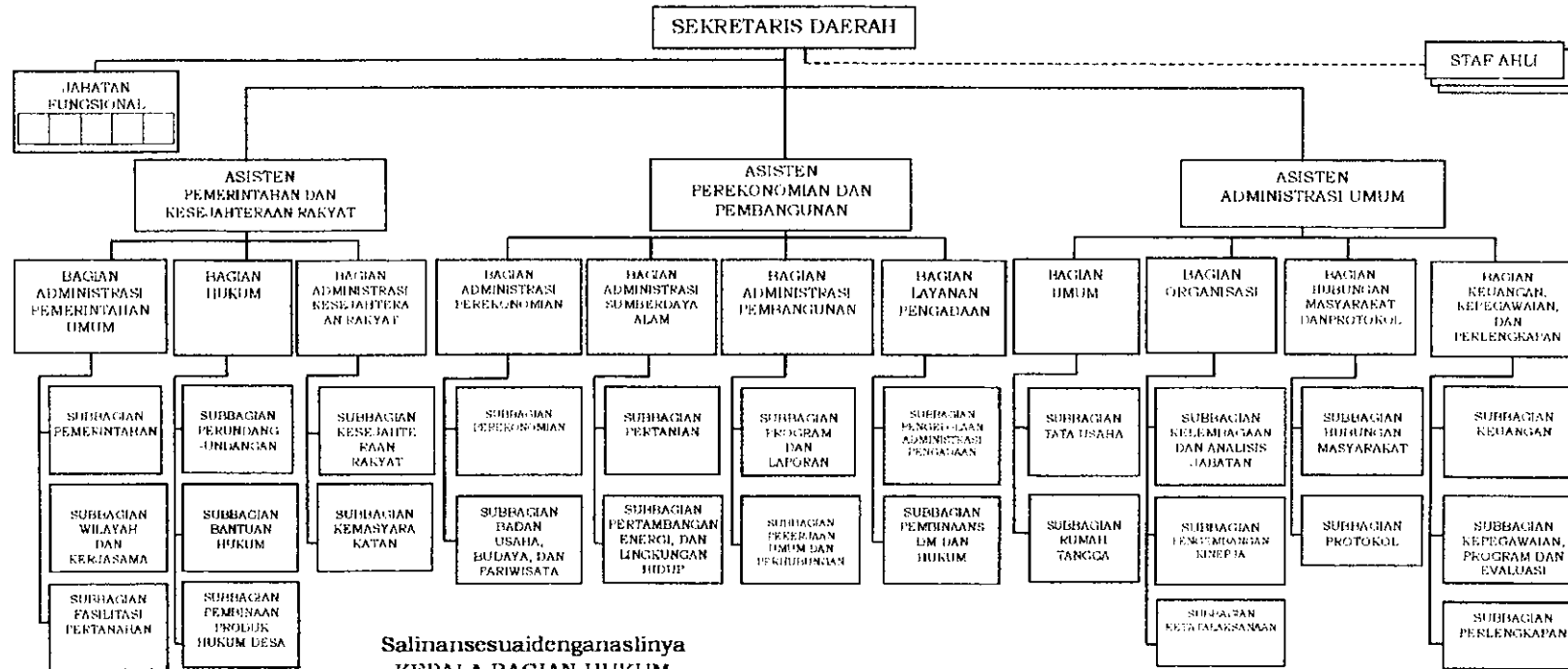
- 2.1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 2.2. Sub Bagian Kemasyarakatan.
- 3. Bagian Hukum
 - 3.1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 3.2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3.3. Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Desa.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian
 - a. Sub Bagian Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Badan Usaha, Budaya dan Pariwisata.
 - 2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
 - a. Sub Bagian Pertanian;
 - b. Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
 - 3. Bagian Administrasi Pembangunan
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
 - 4. Bagian Layanan Pengadaan
 - a. Subbagian Pengelolaan Administrasi Pengadaan
 - b. Subbagian Badan Usaha, Budaya dan Pariwisata
- d. Asisten Administrasi Umum**
 - 1. Bagian Umum
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - 3. Bagian Organisasi
 - a. Sub Bagian Pengembangan Kinerja;
 - b. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

- c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- 4. Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, program dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN I.1
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 41 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK



Salinanscsuaidenganaslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661107 199403 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, "mind set and culture" masih belum terlaksana
2. Akuntabilitas Kinerja yang perlu ditingkatkan lagi yang meliputi nilai ukur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, keselarasan antara perencanaan dengan program kegiatan yang ada, semakin baiknya, penyelarasan Rancangan Umum Pengadaan (RUP) dengan Program Kegiatan yang ada

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Menelaah visi misi dan program Kepala Daerah terpilih ditunjukkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi capaian visi misi Kepala Daerah tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk sejalan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2019-2023.

Adapun rumusan visi kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)”

Visi tersebut memberikan makna bahwa kinerja pembangunan daerah yang ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor prioritas, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya visi tersebut memberikan makna bahwa pembangunan dimulai dari desa dengan membangun desa, dengan adanya desa yang maju diharapkan membawa dampak yang positif juga bagi perekonomian yang maju, yang juga berdampak positif bagi kota dalam hal ini menata kota.

Menelaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 6 misi yaitu :

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Rukun, Dinamis dan Harmonis dengan Seni Budaya dan Kearifan Lokal (Bermartabat);
2. Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan SDM Daerah (Adil dan Bermartabat);
3. Memperkuat Kinerja Birokrasi Bersih, Profesional dan Akuntabel yang berorientasi pada Pelayanan Publik yang berkualitas dan Pro Rakyat (Maju dan Bermartabat);
4. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Kerakyatan bertumpu Sektor Pertanian, Pariwisata, dan Potensi Lokal Lain untuk mendukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan (Maju);
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan yang Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan (Maju).

Misi 1 : Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Rukun, Dinamis dan Harmonis dengan Seni Budaya dan Kearifan Lokal (Bermartabat)

Bertujuan : Meningkatkan Derajat Kualitas Hidup Masyarakat Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Rukun, Dinamis dan Harmonis dengan Seni, Budaya dan Kerifan Lokal

Sasaran yang Ingin dicapai :

1. Meningkatnya Stabilitas Kondisi Sosial, Ketertiban dan Ketentraman Wilayah;
2. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Seni, Budaya dan Tradisi Lokal;
3. Meningkatnya Nilai Modal Sosial Kepemudaan dan Perempuan Daerah.

Misi 2 : Meningkatkan Pengembangan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Daerah.

Bertujuan : Meningkatkan Pengembangan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Pemerataan Pualitas Pesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Tangguh Bencana
3. Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja

Misi 3 : Memperkuat Kinerja Birokrasi Bersih, Profesional dan Akuntabel yang berorientasi pada Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Pro Rakyat.

Bertujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Profesional dan Akuntabel dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Berkualitas dan Pro Rakyat.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas dan Kemandirian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Misi 4 : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Eerakyatan Bertumpu Sektor Pertanian, Pariwisata, dan Potensi Lokal Lain untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan.

Bertujuan : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi daerah yang Inklusif, Merata dan Berkualitas berbasis pada sektor Pertanian, Pariwisata, dan Potensi Daerah Lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata Daerah dalam mendukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan;
2. Meningkatnya Kemandirian dan Keberdayaan Pembangunan Desa;
3. Meningkatnya Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan yang Berkualitas Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Bertujuan : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Merata, Berkelanjutan dan Terintegrasi dengan Pembangunan Perdesaan Yang Lestari dan Berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya Akses Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Kabupaten Nganjuk.
2. Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal;
3. Meningkatkan Kemandirian Daerah;

Telaahan terhadap Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Sekretariat Daerah. Hal ini, terkait dengan pernyataan Misi ke 3 :

“Memperkuat kinerja birokrasi Bersih, Profesional dan Akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan Pro Rakyat (Maju dan Bermartabat)” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas dan Kemandirian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pada misi ke 3 ini Sekretariat Daerah berperan dalam pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan penguatan payung hukum berupa Road Map Reformasi dalam rangka mencapai tujuan :

“ Peningkatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi “

Sedangkan sasaran yang akan tercapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah
2. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3. Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum melalui Produk Hukum yang Berkualitas
4. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100%
2.	Meningkatnya efektifitas	Persentase rumusan	100%

	Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%
3.	Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%
4.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	45%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq	100%

	dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	B (baik)	
--	--	----------	--

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2019-2023 dengan mengambil target tahun 2020

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2019 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Perjanjian Kinerja terdiri dari 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah.
2. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

3. Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas
4. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan.
5. Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik

Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100%
2.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang	100%

		ditindaklanjuti	
3.	Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%
4.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	45%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	100%

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan

Kegiatan dengan keseluruhan anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 16.093.693.676 (Enam Belas Milyar Se

mbilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) telah terserap sebesar 84,01 % atau sejumlah 27.700.688.076,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Perubahan (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	%	100%	150%	150%
4.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	%	100%	100%	100%

	jasa					
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	%	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	%	100%	100%	100%

Sesuai Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023, terdapat satu tujuan, serta tujuh sasaran strategis, adapun analisa dari lima sasaran strategis untuk mencapai tujuan dan misi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 :					
Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi					
SASARAN STRATEGIS 1 :					
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	%	Sangat Tinggi	100%	100%	100 %

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100%	100%	100%

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sampai Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100 %	100 %	100 %

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	218.825.000
		Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	218.825.000
		Total Anggaran	218.825.000

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100 %	100 %	100 %	218.825.000	191.913.690	87.70 %
	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				218.825.000	191.913.690	87.70 %

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100 %	87.70%	87.70%

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 :					
Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi					
SASARAN STRATEGIS 2 :					
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019(%)	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	-	100% (1 rumusan kebijakan)	100% (1 rumusan kebijakan)	100 %
Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	%	-	100% (2 rumusan kebijakan)	100% (2 rumusan kebijakan)	100 %

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	-	-	100 %
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	-	-	100 %

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sampai Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	-	100 %
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	-	100 %

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	1.361.937.000
		Koordinasi Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan	78.350.000
		Pelayanan bantuan kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan non formal	260.000.000
		Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	206.902.600
		Peningkatan Pelayanan bagi calon Jamaah Haji	-
		Peningkatan Pelayanan Bantuan Tempat Ibadah	44.500.000
		Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	41.621.200
		Pembinaan mental dan kerohanian	730.563.200
		Total Anggaran	631.373.800
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	268.123.000
		Koordinasi Pelaksanaan kesejahteraan	268.123.000
		Total anggaran	268.123.000

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	1.361.937.000	1.007.090.029	37.9%
	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %	78.350.000	55.244.500	70.51 %
	Pelayanan bantuan kegiatan keagamaan dan pendidikan keagamaan non formal	100 %	100 %	100 %	260.000.000	251.646.800	96,79%
	Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	100 %	100 %	100 %	206.902.600	120.240.000	58.11%
	Peningkatan Pelayanan bagi calon Jamaah Haji	100 %	100 %	100 %	-	-	-
	Peningkatan Pelayanan Bantuan Tempat Ibadah	100 %	100 %	100 %	44.500.000	21.876.000	49.16%
	Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	41.621.200	32.781.029	78.76%
	Pembinaan mental dan kerohanian				730.563.200	450.823.700	61.71
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	268.123.000	53.634.500	67.4%
	Koordinasi Pelaksanaan kesejahteraan	100 %	100 %	100 %	268.123.000	53.634.500	67.4%

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	37.9%	37.9%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	67.4%	67.4%

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 :					
Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi					
SASARAN STRATEGIS 3 :					
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	%	-	100% (5 raperda)	150% (8 Raperda)	150 %

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dan 2019

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	-	-	150%

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sampai Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	150 %	-	150 %

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	1.756.555.000
		Penyusunan dan Penelitian Produk Hukum	927.830.000
		Program Pembinaan/Penyuluhan Hukum	75.975.000
		Produk Penerapan/Penegakan Hukum	752.750.000
		Total Anggaran	1.756.555.000

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Jaminan Kepastian	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	100 %	150%	150 %	1.756.555.000	757.904.295	37.15 %

Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	bertentangan dengan peraturan di atasnya						
	Penyusunan dan Penelitian Produk Hukum	100 %	150 %	150 %	927.830.000	414.936.140	44.72 %
	Program Pembinaan/Penyuluhan Hukum	100 %	100 %	100 %	75.975.000	17.893.500	23.55%
	Produk Penerapan/Penegakan Hukum	100 %	100 %	100 %	752.750.000	325.074.655	43.18%

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	150 %	37.15%%	37.15 %

SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 :					
Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi					
SASARAN STRATEGIS 4 :					
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	-	100%	100%	100 %

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	-	-	100%

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sampai Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	-	100 %

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	144.284.000
		Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	144.284.000
		Total Anggaran	144.284.000

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	144.284.000	83.610.250	57.95 %

	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	100 %	100 %	100 %	144.284.000	83.610.250	57.95 %
--	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------------	------------	---------

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	57.95 %	57.95 %

SASARAN STRATEGIS 5 :

Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 :					
Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi					
SASARAN STRATEGIS 5 :					
Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa.					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	%	-	100%	100%	100 %

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	-	-	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sampai Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	100 %	-	100 %

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	597.114.000
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	597.114.000
		Total Anggaran	597.114.000

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	100 %	100 %	100 %	597.114.000	454.490.746	76.11 %
	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah	100 %	100 %	100 %	597.114.000	454.490.746	76.11 %

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	100 %	76.11%	76.11%

SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 :					
Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi					
SASARAN STRATEGIS 6 :					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019%)	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	%	50,92%	100%	65.39%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dan 2019

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	100%	50.92%	65.39%

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sampai Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	65.39%	50.92%	65.39%

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	215.268.000
		Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	215.268.000
		Total Anggaran	215.268.000

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	100%	65.39%	100%	215.268.000	140.766.780	65.39 %
	Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100%	65.39%	100%	215.268.000	140.766.780	65.39 %

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	100%	65.39%	65.39%

SASARAN STRATEGIS 7 :

Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 :					
Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi					
SASARAN STRATEGIS 7 :					
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019(%)	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	
			Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sampai Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	100%	100%	100%

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	24.334.148.676
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.600.404.600
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.471.000.000
		Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	127.559.876
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.380.000.000
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Telekomunikasi	1.973.305.000
		Program peningkatan disiplin aparatur	370.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44.400.000
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kehumasan dan keprotokolan	5.123.022.500
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	244.456.700
		Total Anggaran	24.334.148.676

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	100 %	100 %	100 %	24.334.148.676	18.940.634.290,4	84,07 %
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	6.600.404.600	5.402.115.407	81.85 %

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	7.471.000.000	3.325.420.023.86	53.82%
	Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	127.559.876	113.379.176	88.88%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	2.380.000.000	949.400.367.86	39.89%
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Telekomunikasi	100 %	100 %	100 %	1.973.305.000	1.757.754.985	59,39%
	Program peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	370.000.000	228.688.750	61.81%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100 %	-	-	-
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	44.400.000	23.087.000	52.00%
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kehumasan dan keprotokolan	100 %	100 %	100 %	5.123.022.500	4.237.167.417	82.71%
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	244.456.700	229.445.500	93.86%

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	100 %	76,44%%	76,44 %

3.2. PENCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100 %	100 %	100%	218.825.000	191.913.690	87.70%
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	1.361.937.000	1.007.090.029	37.9%
	Persentase rumusan kebijakan di	100 %	100 %	100 %	268.123.000	53.634.500	67.4%

	bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti						
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100 %	150 %	150 %	1.756.555.000	757.904.295	37.15 %
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	144.284.000	83.610.250	57.95 %
Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	100%	100%	100%	597.114.000	454.490.746	76.11 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ baik "B"	100%	65.39 %	100%	215.268.000	140.766.780	65.39 %
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	100%	100%	100%	24.334.148.676	18.940.634.290,4	84,07 %

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran/ Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100 %	87.70%	87.70%
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	37.9%	37.9%
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	67.4%	67.4%
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	150 %	37.15 %	37.15 %
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	57.95 %	57.95 %
Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP	100 %	76.11 %	76.11 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD \geq baik "B"	100%	65.39 %	65.39 %
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM \geq B (baik)	100 %	84,07 %	84,07 %

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasar pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dan mempunyai fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Nganjuk telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkankinerjanya.

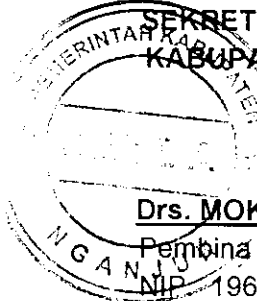
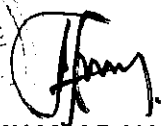
- b. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. memberdayakan sumber daya yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk secara menyeluruh, efektif, dan efisien;

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Nganjuk,

2021

1	P	18/2 2021
2		
3	9	18/2 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661005 198703 1 010